



PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Satu PKL Meninggal Positif Korona,

Malioboro Telusuri Kontak

YOGYAKARTA, KOMPAS — Setelah meninggalnya seorang pedagang kaki lima karena positif Covid-19 di tujuan wisata ikonik Malioboro di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, penelusuran kontak erat terus dilakukan. Namun, Pemerintah Provinsi DIY tidak akan menutup Malioboro.

"Kamiimbau para pengelola destinasi wisata meningkatkan kewaspadaan. Sejak awal, kami juga sudah mengimbau mereka agar jangan kendur menerapkan protokol kesehatan," ujar Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo, Selasa (8/9/2020), di Yogyakarta.

Pedagang itu dikonfirmasi positif Covid-19, Jumat (4/9), saat meninggal dan dimakamkan di Kabupaten Kulon Progo. Pada 20-26 Agustus, ia masih aktif berjualan di kawasan Malioboro sebelum libur karena sakit pada 27 Agustus.

Beberapa waktu terakhir, kawasan Malioboro sudah dikunjungi banyak wisatawan meskipun pandemi di DIY belum terkendali. Bahkan, saat masa libur panjang akhir pekan pertengahan Agustus lalu, pengun-

jung Malioboro sekitar 2.000 orang dalam sehari.

Singgih mengatakan, Pemkot Yogyakarta telah melakukan penelusuran kontak. "Pemerintah Kota Yogyakarta sudah punya metode untuk melakukan *tracing*. Tentu ini harus dilakukan cepat," kata Singgih.

Pemerintah Provinsi DIY masih membolehkan destinasi wisata beroperasi dan menerima kunjungan. Pemprov juga belum berencana memberlakukan regulasi lebih ketat terkait kunjungan wisatawan. Saat ini, sedikitnya 71 destinasi wisata di DIY sudah beroperasi.

Pada pertengahan Juli 2020, jumlah wisatawan yang datang ke DIY saat akhir pekan hanya sekitar 13.000 orang sehari. Namun, beberapa hari ini, kunjungan wisatawan di DIY pada akhir pekan bisa 30.000 sampai 40.000 orang sehari.

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyampaikan, saat ini pihaknya masih berfokus pada penelusuran kontak kasus positif dari PKL Malioboro. Hasil penelusuran kontak akan digunakan menganalisis potensi

penularan dari aktivitas wisata. Sebab, sumber penularan utama juga belum bisa dipastikan.

"Kasus ini belum bisa dilihat secara keseluruhan karena kami masih dalam upaya melakukan *tracing* dan menganalisis masalahnya. Kalau hasil *tracing*-nya banyak, kami harus mengevaluasi ke wilayah yang lebih luas lagi," katanya.

Saat ini, yang diharapkan kepada semua pihak adalah disiplin pada protokol kesehatan.

Terkait pendisiplinan pada protokol kesehatan, Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, baru mengeluarkan kebijakan sanksi pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi. Namun, kebijakan itu baru bisa efektif diterapkan 14 September 2020.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palangkaraya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Palangkaraya. "Kami masih sosialisasi selama seminggu ke setiap kecamatan hingga RT/RW.

Kami imbau para pengelola destinasi wisata meningkatkan kewaspadaan.

Setelah itu (sosialisasi) baru bisa efektif diterapkan," kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangkaraya Emi Abriyani.

Data Kalteng terdapat 2.801 kasus terkonfirmasi positif atau bertambah 31 kasus dibandingkan Senin. Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 976 kasus, dibandingkan 13 kabupaten lain.

Penerapan sanksi yang diatur, masyarakat diminta mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang melanggar didenda hingga Rp 100.000 per orang. Di samping denda, diterapkan sanksi kerja sosial seperti menyapu jalan dua jam sehari.

Selain menyapu jalan, pelanggaran diwajibkan jadi sukarelawan Covid-19 di Kota Pa-

langkaraya. Sanksi juga diterapkan bagi pemilik usaha dan pengelola fasilitas publik jika melanggar protokol kesehatan.

Kebijakan di Palangkaraya itu mempertegas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bedanya, denda dalam pengub lebih besar, hingga Rp 250.000.

Target Jawa Barat

Di Kota Bandung, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat menargetkan 105.000 tes usap dalam dua pekan ke depan. Namun, target itu tetap belum mampu mengejar 500.000 tes atau sekitar 1 persen dari penduduk Jabar.

Hingga Selasa sore, Jabar sudah melakukan tes usap (*swab*) 291.396 spesimen, belum optimal dibandingkan hampir 50 juta penduduk Jabar.

Ketua Divisi Pelacakan Kontak Pengujian dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Siska Gerfianti

mengatakan, pihaknya telah meningkatkan kapasitas tes di laboratorium menjadi 54.000 sampel per minggu. Bulan lalu, sekitar 35.000 tes per minggu.

"Kami mengejar 105.000 tes usap dalam dua minggu ini. Kami juga menunggu bantuan 250.000 tes PCR dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ujarnya.

Alat tes PCR itu akan disebar ke 27 kabupaten/kota di Jabar. Kuotanya disesuaikan untuk mengejar target tes terhadap 1 persen populasi daerah masing-masing.

Selain menggelar tes masif, pelacakan kontak juga terus dilakukan, salah satunya di kawasan industri, seperti di Kabupaten Bekasi dan Karawang, kluster baru penularan.

Data *Kompas*, kasus positif Covid-19 di kluster industri di Bekasi mencapai 698 kasus. Penularan diduga berasal dari aktivitas pekerja di luar pabrik.

Tingginya kasus di Kabupaten Bekasi menjadikan wilayah tersebut masuk zona merah atau berisiko tinggi. Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok juga berada di zona serupa. Di

Bodebek, hanya Kabupaten Bogor yang tidak berada di zona merah.

Munculnya kluster penularan baru membuat kasus Covid-19 di Jabar meningkat. Dua pekan terakhir, kasus baru selalu di atas 100 kasus per hari.

Hingga Selasa pukul 18.00, kasus positif korona di Jabar 13.045 orang. Ada 3.375 kasus baru dua minggu terakhir.

Di Kalimantan Barat, tiga kabupaten berstatus zona hijau memendam risiko tinggi penularan Covid-19, yakni Sanggau, Sekadau, dan Kayong Utara. Pengambilan sampel uji usap di wilayah itu sangat minim.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson mengatakan, meski zona hijau, bukan berarti daerah itu aman dari korona. Sesuai peraturan gubernur Kalbar, kabupaten/kota wajib mengirim sampel usap minimal 200 per minggu ke Dinkes Kalbar. Minggu pertama September, Sanggau dan Kayong Utara mengirim masing-masing dua sampel, Kapuas Hulu satu sampel, dan Kota Singkawang malah belum mengirim.

(NCA/HRS/IDO/TAM/ESA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005